KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 7 6 3				H.4 X Final	
			H.2	H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan				Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG									
A.1 NPWP : 15 695 476 0 722 000									
A.2 NIK :									
A.3 N	A.3 Nama : HARI JUMADI								
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG									
MASA PAJAK (mm-yyyy)		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
	B.1	B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
	5	21-402-01		7.355.000	7.355.000	0	5	367.750	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota									
B.8	.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 04822/LS-TJ/RSJD.AHM/2022								
	Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 1 dd 0 5 mm 2 0 2 2 yyyy								
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.									
	Nomor: Tanggal dd mm yyyyy								
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :									
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :									
C. IDE	ENTITAS PE	MOTONG PAJAK							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0									
C.2	C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR								
C.3	:3 ID Subunit Organisasi :								
C.4			1 1	1 1 dd 0 5 mm 2 0 2 2 yyyy					
C.5 Nama Penandatangan :			RIAN	RIANDY					
C.6	Pernyataan \	Wajib Pajak :		n ini saya menyatakan ba angani secara elektronik.	ahwa bukti Pemotongan/Pemungut	tan Unifikasi telah sa	ya isi dengan	benar dan telah saya	
				dengan ketentuan yang nik sehingga tidak diperl	berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	r mengatur bahwa do	kumen ini tel	ah ditandatangani secara	

OTA03WU7